

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk I periode (satu) Tahun, Renja Tahun Anggaran 2024 ini sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan organisasi yaitu urusan wajib bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang membidangi pembangunan dan penyebarluasan informasi, pengembangan dan pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi merupakan aspek yang menyajikan fasilitasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun kelompok masyarakat, organisasi termasuk dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik.

Salah satu upaya guna mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik elektronik government (E-gov) yang

dimaknai sebagai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar mendapatkan hasil yang optimal maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rancangan belanja dinas, prioritas kegiatan dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

diharapkan Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika mampu terintegrasi dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat dan Program Pemerintah Daerah Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2024 ini disusun dengan mepedomani :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
4. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 7. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang satu Data Indonesia
 9. Peraturan Menteri Kominfo No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Urusan pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
 10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Rancangan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi adalah sebagai bahan

masukan awal penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tahun 2024 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Pendanaan

5. BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun Lalu

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas kominfo pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Pelaksanaan kegiatan mencapai 100% dilihat dari capaian kinerja secara fisik dan 98.13% dari capaian realisasi Keuangan. Dilihat lebih lanjut dari capaian kinerja Dinas Kominfo tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target; dan
3. Target dengan capaian realisasi di atas 76%-90% sebanyak 5 target

Lebih lanjut capaian fisik renja dan Keuangan dapat dilihat pada table berikut:

Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi									
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran TW IV		Capaian (%)		Akar Permasalahan dan Solusi
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	30,175,306	2	16,951,478	100	56.18	Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran tidak optimal Target telah tercapai pada TW III
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2	11,450,000	2	3,070,000	100	26.81	Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran tidak optimal Target telah tercapai pada TW III
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2	8,820,000	2	8,820,000	100	100.00	Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada permasalahan Target telah tercapai pada awal TW IV
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	172,691,041	2	172,691,041	100	89.23	Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data laporan dari bidang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan Solusi Melaksanakan SOP pengumplan data kinerja dan meminta bahan dengan surat tertulis ditandatangani oleh kadis

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran TW IV		Capaian (%)		Akar Permasalahan dan Solusi
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	9,035,309,608	14	8,818,771,331	100	97.60	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan Target telah tercapai pada TW IV
2	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	251,194,400	12	250,280,315	100	99.64	Permasalahan : • Pengumpulan SPJ dari masing2 PPTK agak terlambat
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1	6,340,000	1	6,180,000	100	97.48	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan Masih dalam tahap proses pengerjaan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah									
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran TW IV		Capaian (%)		Akar Permasalahan dan Solusi
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	

1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang melaksanakan Diklat/Bintek Berdasarkan Tugas dan	25	120,345,300	25	112,885,218	100	99.69	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan Menyesuaikan dengan kebutuhan diklat dari masing2 bidang
2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut dinas	150	97,500,000	150	97,200,000	100	99.69	Permasalahan: Tidak ditemukan masalah Pengadaan telah dilaksanakan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran TW IV		Capaian (%)		Akar Permasalahan dan Solusi
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	261,414,814	2	261,067,248	100	99.87	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	37,375,000	12	33,612,500	100	89.93	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	64,248,750	6	58,750,214	100	91.44	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	63,070,416	5	51,650,513	100	81.89	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan

	Perundang-undangan								
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	735,160,000	2	721,947,066	100	98.20	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan Masih dalam tahap proses pengerjaan

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran TW IV		Capaian (%)		Akar Permasalahan dan Solusi
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	179,893,803	20	179,817,258	100	100.00	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah pengadaan peralatan kantor/operasional	14	381,701,992	14	372,380,000	100	97.56	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran TW 1V		Capaian (%)		Akar Permasalahan dan Solusi
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2,200,000	1	1,860,360	100	84.56	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2,857,290,400	2	2,854,186,627	100	99.89	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	12,939,419	1	11,666,200	100	90.16	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
No	Sub Kegiatan	Indicator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran TW 1V		Capaian (%)		Akar Permasalahan dan Solusi
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	406,266,020	26	266,802,257	100	65.67	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan

2.	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	168,096,000	1	167,237,600	100	99.49	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
3.	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	70,480,000	24	55,845,100	100	79.24	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi									
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran TW IV		Capaian (%)		Akar Permasalahan dan Solusi
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	6	270,987,860	6	252,511,519	100	93.18	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
2.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media bekerjasama dengan Pemerintah daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5	12,730,773,608	5	12,723,294,794	100	99.94	Permasalahan : • Meskipun capaian fisik tercapai 100% namun jika dilihat dari jumlah media yang bekerjasama, Perlu adanya verifikasi media

									yang akan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Solusi : Penerapan kriteria media
3.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3	285,775,450	3	284,340,523	100	99.50	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
4.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Pembinaan KIM Terlaksananya penyampaian Informasi Melalui kegiatan literasi Media Pembentukan Forum Bakohumas Provinsi	7	2,082,513,074	7	1,998,186,656	100	95.95	Permasalahan : • Kurangnya dukungan pemerianatah Kab/Kota dalam pembentukan KIM di daerah Solusi : Melakukan sosialisasi melalui FGD dan surat ke Pemerintah Kab/Kota
5.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	60	210,881,300	60	208,755,756	100	98.99	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
6.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1	1,082,401,348	1	1,071,370,238	100	98.98	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
7.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan	Jumlah pengadaan sarana dan Prasarana pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	6	264,640,000	6	260,540,000	100	98.45	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan

	Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi									
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran TW IV		Capaian (%)		Akar Permasalahan dan Solusi
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	JJumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	300	90,907,515	300	90,410,442	100	99.45	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
2. Kegiatan Pengelolaan e-government diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi									
No	Sub kegiatan	Indicator kinerja	Target kinerja dan anggaran		Realisasi capaian kinerja dan anggaran TW IV		Capaian (%)		Akar permasalahan dan solusi

		program/kegiatan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	2	195,789,800	2	195,702,955	100	99.96	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
2.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5	688,799,730	5	643,821,014	100	93.47	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
3.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Jumlah penyediaan akses internet desa/kelurahan Jumlah OPD dilakukan Peremajaan sarana dan prasarana TIK	3	6,199,316,400	3	6,096,414,845	100	98.34	Permasalahan - Lokasi yang sulit dijangkau - Jangkauan akses internet terbatas 50-100 m
4.	Pengelolaan Government Chief	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Persentase	5	506,742,000	5	505,980,014	100	99.85	Permasalahan - Perlu adanya pemanfaatan lebih luas

	Information Officer (GCIO)	peningkatan kualitas layanan command center							oleh bidang statistik, tidak hanya 12 dashboard namun terhadap seluruh data statistik sektoral
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi									
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran TW IV		Capaian (%)		Akar Permasalahan dan Solusi
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral	Tersedianya data Statistik sektoral Provinsi dan Kabupaten/kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	110,171,667	3	105,784,334	100	96.02	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
2.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	65	167,883,028	65	167,133,738	100	99.55	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan

3.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	29	102,147,457	29	96,725,742	100	94.69	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi									
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran TW IV		Capaian (%)		Akar Permasalahan dan Solusi
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi, dan kebijakan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi	1	95,167,644	1	94,852,074	100	99.67	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
2.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan	Jumlah Dokumen Audit Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah ASN yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi	1	223,584,800	1	223,573,749	100	100	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan

	Informasi Pemerintah Daerah Provinsi								
3.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Workshop/Bimtek terkait keamanan informasi Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan se- Provinsi Jambi yang berbasis elektronik dan non elektronik	1	84,629,606	1	84,498,657	100	99.85	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
4.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10	191,778,159	10	191,556,442	100	99.88	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan
1. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi									
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran TW IV		Capaian (%)		Akar Permasalahan dan Solusi
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi	Tersedianya jarring Komunikasi sandi pemerintah daerah	10	34,930,300	10	34,930,300	100	100	Permasalahan : • Tidak ada permasalahan

	Sandi Pemerintah Daerah Provinsi								
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jambi

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kominfo Provinsi Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen Bersama Perangkat daerah terkait keterbukaan Informasi publik pemerintah daerah mengingat sumber Informasi berasal dari Perangkat daerah dan menjamin ketersediaan layanan Informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat.
2. Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat secara mudah;
3. Jumlah kerjasama dengan media melebihi target namun perlu memperhatikan kriteria yang harus dipenuhi oleh media.
4. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet lingkup Pemerintah Provinsi Jambi pada semua Perangkat Daerah serta jaringan intranet kepada pemerintah kabupaten/kota yang juga merupakan indikator nasional;
5. Peningkatan komitmen dan implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Jambi dengan memperhatikan percepatan penerapan system penghubung layanan pemerintah daerah, optimalisasi layanan pemerintah berbasis elektronik, dan ;
6. Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Jambi yang menguasai teknologi informasi secara berkala dan berkelanjutan.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sasaran Diskominfo ini juga mendukung sasaran pemerintah daerah yakni Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026 dengan indikator Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses internet. Usulan yang masuk dari Kabupaten-Kota se-Provinsi Jambi pada pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan keterhubungan jaringan Komunikasi dan Informasi pada setiap desa di Provinsi Jambi.

Upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2021-2026, salah satunya melalui Program Unggulan DUMISAKE. Sejalan dengan program DUMISAKE, usulan yang diterima dalam forum Perangkat daerah yakni pemerintah daerah kabupaten/kota mengusulkan Penyediaan internet di desa dan pembangunan tower di wilayah blank spot.

Dalam pengadaan internet bagi desa yang masuk dalam kategori blank spot digunakan 3 metode atau cara agar dapat dilaksanakan dengan optimal yaitu :

- 1) Penggunaan fiber optic, opsi ini yang paling dianjurkan karena kualitasnya lebih baik, ini digunakan bagi daerah/desa yang tidak terlalu jauh dari jaringan kabel fiber optic terdekat.
- 2) Triangle yaitu dengan membuat tiang pemancar kecil yang berfungsi sebagai penguat sinyal yang diambil dari BTS terdekat
- 3) VSAT yaitu akses internet yang menggunakan satelit, ini digunakan apabila kondisi geografis sangat terpencil/sulit dijangkau.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2023 Program Dumisake telah mencapai 80% dari target yang telah ditentukan. Kendala yang dialami pada jumlah anggaran yang tersedia ditengan refocusing anggaran dan lokasi sebaran titik blank spot. Direncanakan tahun 2024 akan tercapai 100%.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMINFO PROVINSI JAMBI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arahan strategi kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain:

- A. Kemenkominfo: Percepatan pengelolaan transformasi digital sebagai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan strategi:
1. Penguatan koordinasi antar instansi pusat, untuk percepatan penyelesaian target SPBE dalam Rencana Induk dan Peta Rencana 2021-2025 melalui penyelarasan perencanaan dan penganggaran SPBE di K/L/D sebagai bagian program nasional, serta implementasi Arsitektur SPBE Nasional yang berbasis proses bisnis lintas sektor pemerintahan (Government Enterprise Architecture);
 2. Penguatan peran Tim Koordinasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat menyelaraskan perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi K/L/D, agar dapat mewujudkan layanan publik dan administrasi pemerintahan yang terintegrasi (digital services), role model : Layanan Bantuan Pemerintah Terintegrasi dan Layanan Perizinan Pemerintah Terintegrasi;
 3. Percepatan terwujudnya sistem penghubung layanan pemerintah, sehingga terjadi kolaborasi data melalui penerapan manajemen data oleh seluruh wali data K/L/D dan interoperabilitas antar sistem yang sudah ada, menjadi layanan digital pemerintah yg terintegrasi (Smart Government);
 4. Percepatan pemanfaatan transaksi elektronik pada setiap aspek layanan, termasuk penggunaan Big Data Pemerintah dan Kecerdasan Artifisial, sebagai bagian Transformasi Digital Nasional.

B. BSSN: Penanganan ancaman siber untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, dengan strategi: **Strategi Preventif:**

1. Penyelarasan Kebijakan dan Kegiatan dengan Strategi Keamanan Siber Nasional;
2. Melakukan pengujian keamanan secara berkala bagi system elektronik yang digunakan pada layanan publik;
3. Melakukan penilaian Tata Kelola keamanan siber;
4. Literasi keamanan siber pada pemangku kepentingan.

Strategi Proaktif dan Reaktif:

1. Penyusunan rencana kontigensi;
2. Pembentukan dan optimalisasi tugas Tim Tanggap Insiden Siber;
3. Melakukan pelaporan secara proaktif apabila terjadi insiden potensi ancaman keamanan siber.

Strategi Deterrent:

1. Kolaborasi dengan penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan kejahatan siber;
2. Membentuk forum koordinasi dengan pemangku kepentingan lain.

C. BPS: Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia, dengan strategi:

1. Adanya uraian tujuan, target, indikator yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan baik tingkat daerah maupun tingkat pusat;
2. Mendukung kebijakan Perencanaan Pembangunan, SPBE, KSP, PDN, hasil keputusan Dewan Pengarah SDI dan isu strategis yang dilaksanakan oleh SDI;
3. Mendukung Daftar Data Prioritas yang dirumuskan Forum SDI tingkat pusat tahun 2020-2021 dari proses pengumpulan hingga penyebarluasan Data Prioritas termasuk Data Dana Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Dana Subsidi;

4. Program dan kegiatan yang akan dilakukan menerapkan prinsip-prinsip SDI yang meliputi standar data, metadata, kode referensi dan interoperabilitas data;
5. Program dan kegiatan yang dilakukan mendukung pemanfaatan data mengacu pada data prioritas daerah dan pusat;
6. Program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Aksi mendukung integrasi KRISNA dan SAKTI sesuai dengan kesepakatan Rapat Dewan Pengarah SDI;
7. Memastikan kolaborasi antar penyelenggara SDI dalam implementasi tata Kelola data dan pengelolaan standar kualitas data yang terdapat dalam Portal

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo Provinsi Jambi

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kominfo Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah :

1. Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi.
2. Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, termasuk fasilitasi pengadaan akses internet di desa untuk mewujudkan Jambi bebas blank spot.
3. Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Meningkatkan tingkat keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
5. Pengelolaan data statistik sektoral Provinsi Jambi dalam Jambi Satu Data.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif/ 91
2.	Meningkatnya infrastruktur TIK, termasuk fasilitasi pengadaan akses internet di desa untuk mewujudkan Jambi bebas blank spot	Jumlah Desa yang difasilitasi akses internet	80
3.	Meningkatnya Penggunaan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3.0
4.	Meningkatnya layanan persandian	Indeks Keamanan Informasi	54%
5.	Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektor al Pemerintah Provinsi Jambi	Persentase Data Statistik Sektor al OPD terinventarisasi m terupdate, valid dan terintegrasi	80%
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kantor dan akuntabilitas kinerja	IKM	81 (B)
		Nilai SAKIP	70 (B)

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk menunjang tercapainya tujuan, sasaran serta indikator kinerja utama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi diimplementasikan melalui 5 Program yang di dukung 13 Kegiatan dan 42 Sub kegiatan yaitu :

Program Prioritas :

1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA.

Program ini bertujuan Penyediaan, pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi serta Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika (TIK) di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Program ini juga bertujuan untuk mendorong seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam ketersediaan Website untuk memberikan informasi Pemerintahan dan Pembangunan website dan aplikasi di Provinsi Jambi guna terwujudnya SPBE Pada program ini pula melaksanakan Program DUMISAKE dengan pengadaan akses internet bagi desa yang termasuk dalam kategori blank spot

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.

Program ini bertujuan untuk melakukan diseminasi informasi dalam rangka memberikan layanan informasi terkait pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi, Peningkatan Kinerja dan kualitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada badan publik, optimalisasi Komisi Informasi sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, antara lain forum informasi, penanganan sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi.

3. PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMAN INFORMASI.

Program ini merencanakan kegiatan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintah terkait dengan persandian

4. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL

Program ini mempunyai fungsi merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengumpulkan data urusan statistik sektoral.

PROGRAM PENUNJANG :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi perkantoran dalam mewujudkan tertib administrasi, kenyamanan kerja serta peningkatan disiplin dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Rencana kinerja tahunan Dinas Kominfo Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2023 terdiri 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yang meliputi :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

1. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - 2) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
 - 3) Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- II. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 3) Pelayanan Informasi Publik
 - 4) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - 5) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 6) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
 - 7) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
- III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
 2. Pengelolaan e-government diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi

- 1) Penatalaksanaan dan pengawasan e-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi
- 2) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik
- 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 4) Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral
 - 2) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi
 - 3) Membangun Metadata Statistik Sektoral

V. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - 2) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - 3) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik
 - 4) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Antar Perangkat Daerah Provinsi
 - 1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMINFO PROVINSI JAMBI

4.1. Rencana Kerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2024 disesuaikan dengan Plafon Anggaran (PPA) yang telah dibahas dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi pada Hari Jumat, tanggal 27 November 2021. Rencana Kerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, merupakan gambaran dari Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Jambi untuk menunjang Jambi MANTAP 2024.

Dinas Kominfo Provinsi Jambi menangani 3 urusan wajib bukan urusan dasar yaitu :

1. Urusan Kominfo
2. Urusan Persandian
3. Urusan Statistik Sektoral

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Dinas Kominfo Provinsi Jambi terdiri dari 5 Program, 12 kegiatan dan 44 sub kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri dari 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan.
2. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang terdiri dari 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan
3. Program Pengelolaan aplikasi informatika yang terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan.
4. Program penyelenggaraan statistik sektoral yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi yang terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan Dinas Kominfo Provinsi jambi.

Melalui 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari setiap program dan kegiatan Dinas Kominfo Provinsi disusun secara spesifik, realistis dilengkapi dengan indikator Kinerja dan target capaian kinerja yang terukur sehingga dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan, target kinerja dan sasaran kegiatan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu Program Kegiatan.

Program yang telah ditetapkan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk mengukur input dan output perlu indikator yang jelas setiap kegiatan, karena Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capai kinerja suatu program atau kegiatan.

Secara rinci Rancangan Rencana Kerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 dengan Total Anggaran Rp. 56.306.299.608,- (lima puluh enam milyar tiga ratus enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah) dijabarkan dalam 5 Program, 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan rincian :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4		5
1.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah.	2 Dokumen	29.000.000
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD.	2 Dokumen	12.630.000
		3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.820.000
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Dokumen laporan Jumlah Rapat Koordinas Jumlah Monev dan dan koordinasi antar Dinas Kominfo se Provinsi Jambi	3 Dokumen 5. kegiatan 12 Kegiatan	285.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	9.140.000.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Berifikasi Keuangan	12 Dokumen	498.634.000

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	6.715.000
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	153.803.600
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/bimtek	25 orang	258.369.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	225.466.548
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12 Paket	45.660.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	6 Paket	45.822.500
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	5 Dokumen	71.788.896

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan konsultasi OPD	1 Tahun	535.160.000
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 unit	99.352.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	95.726.400
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	20 Paket	216.041.068
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	17 unit	387.376.072
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terpenuhinya layanan jasa surat menyurat	1 tahun	2.500.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa bandwidth OPD	1.5 MB	2.706.459.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	1 tahun	19.216.237

7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	26 unit	465.125.840
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi gedung/kantor	2 unit	204.408.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana/prasarana gedung/kantor	16 unit	70.480.000

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4		5
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 dokumen	499.852.400

	Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media bekerjasama dengan Pemerintah daerah	220 media	15.363.096.748
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 dokumen	396.000.000
			Ter-update-nya Informasi Publik setiap saat pada badan publik lingkup Pemprov Jambi dan 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi	70%	
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	8 dokumen	2.180.000.000
			Jumlah Pembinaan KIM	10 KIM	
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	180 orang	406.899.500
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Penyelesaian Sengketa informasi publik sesuai UU KIP	100%	1.593.000.000
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	6 Unit	850.040.000

		Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		
--	--	--	--	--	--

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4		5
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Provinsi	1 Dokumen	231.152.735
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	2 dokumen	236.214.800
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	umlah aplikasi yang terintegrasi	12 unit	759.227.000

		Pemerintahan Berbasis Elektronik			
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 dokumen	14.658.058.400
			Jumlah penyediaan akses internet desa/kelurahan	80 desa	
		Pengelolaan government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	4 dokumen	999.464.360

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4		5
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	Jumlah Dokumen data Statistik sektoral yang	43 OPD 11 Kab/Kota di	162.526.867

		Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	telah diolah dan dianalisis melalui forum data	Prov Jambi (54 dokumen)	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	meningkatnya aparatur yang berkualitas dan profesional di bidang Statistik sektoral	65 orang	257.949.278
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya meta data Statistik sektoral di Provinsi Jambi	43 OPD 11 Kab/Kota di Prov Jambi (54 dokumen)	228.501.458

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4		5
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1. Jumlah Dokumen pengelolaan Informasi Rahasia / Terbatas / Biasa Milik Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi	1 Dokumen 3 OPD	149.844.144

			2. Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Sertifikat Elektronik di Provinsi Jambi		
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Operasional Layanan Kemanan Informasi Urusan Siber 2. Jumlah Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas SDM urusan Siber di Provinsi Jambi	20% 2 orang	306.940.600
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		1 Laporan	235.042.116,00
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah		15 Perangkat Daerah	299.995.250

		Daerah Provinsi			
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	10 Perangkat Daerah	126.074.800

4.2. Rencana Pendanaan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2024

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jambi pada tahun 2024 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kominfo Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.44.122.660.493,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja Diskominfo berasal seluruhnya dari APBD yang didukung oleh 5 program dan 13 kegiatan.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, tersaji dalam suatu perencanaan yang tersusun secara sistematis dan menganut Asas Kepatutan sehingga dalam menyusun DPA-SKPD diharapkan mampu mencerminkan Input dan OUT-PUT Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2024.

Sebagai bagian penutup dari Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2024 salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

KEPALA DINAS,



Drs. ARIANSYAH, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19720603 199302 1 001